

Pengaruh Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

Rosma¹, Djainuddin²

¹Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

* Corresponding Author

Email : djainuddinmaggasingang.dpk@uim-makassar.ac.id

Keywords:

BPD;
Village Government;
Government Administrators

ABSTRACT

This study aims to: 1) determine the influence of the BPD on the implementation of government in Sudirman Village, Tanralili District, Maros Regency, 2) determine how much contribution the BPD has to the implementation of government in Sudirman Village, Tanralili District, Maros Regency, and 3) determine whether the BPD has a significant influence on the implementation of government in Sudirman Village, Tanralili District, Maros Regency. This study uses a quantitative method conducted at the Sudirman Village Office with a sample of 36 employees. Data collection techniques were carried out through observation, questionnaires, interviews, and documentation. Data analysis includes validity, reliability, correlation, coefficient of determination, and statistical significance tests to examine the relationship between variables and draw research conclusions. The results of this study indicate that the role of the Village Consultative Body (BPD) has a significant influence on the implementation of government in Sudirman Village, Tanralili District. There is a fairly strong positive relationship with a correlation coefficient of 0.514 and a significance of 0.004. Although its contribution is not yet dominant (R Square 26.4%), the role of the BPD remains statistically significant, both overall and partially, confirming the importance of strengthening the BPD's role in improving the effectiveness of village governance.

Kata Kunci:

BPD;
Pemerintah Desa;
Penyelenggara Pemerintah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pengaruh BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa Sudirman Kec.Tanralili Kab.Maros, 2) mengetahui seberapa besar kontribusi BPD terhadap penyelenggaraan pemerintah di desa Sudirman kec Tanralili kab.Maros, dan 3) mengetahui apakah BPD berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa Sudirman kec.Tanralili kab.Maros. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilaksanakan di Kantor Desa Sudirman dengan sampel 36 orang pegawai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data mencakup uji validitas, reliabilitas, korelasi, koefisien determinasi, dan uji signifikansi statistik untuk menguji hubungan antar variabel dan menarik kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili. Terdapat hubungan positif yang cukup kuat dengan koefisien korelasi 0,514 dan signifikansi 0,004. Meskipun kontribusinya belum dominan (R Square 26,4%),

peran BPD tetap berpengaruh nyata secara statistik, baik secara keseluruhan maupun parsial, yang menegaskan pentingnya penguatan peran BPD dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (1), yang berbunyi “Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara kesatuan yang seluruh wilayah dan pemerintahan Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Begitu pula dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal 18 pasca amandemen yang mengatur secara garis besar konsep otonom daerah di Indonesia, pasal ini mengamanatkan tentang bagaimana hubungan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar provinsi, kabupaten serta kota. Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa Negara sangat menghargai dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan manusia dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman antar daerah di seluruh pelosok negeri merupakan sebuah keunggulan yang tidak dimiliki oleh Negara lain. Konsep otonomi daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun dalam bentuk kesatuan, akan tetapi didalamnya terdapat penyelenggaraan system yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan daerah masing-masing. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pasal 18, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 1 angka 43 yang menyatakan “Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan hal di atas, maka desa diakui oleh Negara sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri tanpa harus dicampuri oleh pihak lain. Pemerintah desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai system pemerintahan paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat, pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa memiliki peran yang strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan Negara yang telah diamanatkan UUD 1945.

Kepala desa beserta perangkat desa dalam unsur melaksanakan peran pemerintahan desa, juga dibantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau memiliki peran dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD, sebagai lembaga yang menjembatani aspirasi masyarakat desa dengan pemerintah desa, memiliki posisi strategis untuk mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Namun, meskipun BPD diharapkan memainkan peran penting, implementasi fungsinya sering kali menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas dan kualitas pemerintahan di tingkat desa. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana BPD mampu memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga pada efektivitas peran BPD. BPD berfungsi sebagai representasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan desa. Fungsi pengawasan yang dimiliki BPD terhadap kinerja pemerintah desa bertujuan untuk menjaga akuntabilitas, namun pada kenyataannya sering kali terdapat kesenjangan antara harapan dan realisasi peran BPD. Sebagian besar desa masih menghadapi keterbatasan dalam partisipasi masyarakat dan dukungan BPD yang kuat, sehingga kualitas pelayanan publik, pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat belum optimal.

Desa Sudirman di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, adalah salah satu desa yang mengalami berbagai dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, kurangnya transparansi, serta kebijakan yang kurang efektif dalam merespons kebutuhan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi peran BPD yang belum termaksimalkan dalam mengawal dan mengawasi kebijakan desa. Dalam konteks ini, perlu ditinjau bagaimana peran BPD dapat ditingkatkan untuk memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas pemerintahan desa.

Selain itu, aspek kapasitas dan kompetensi anggota BPD juga menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap efektivitas peran BPD. Rendahnya pengetahuan anggota BPD mengenai regulasi, tata kelola pemerintahan, dan aspek pengawasan menyebabkan BPD seringkali kurang optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di Desa Sudirman, minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk anggota BPD telah menghambat peran strategis mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kompetensi BPD agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih baik.

Peran BPD yang efektif dalam musyawarah desa juga berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan desa. BPD yang mampu memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan desa akan mendukung terciptanya kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa di Desa Sudirman, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa masih minim. BPD harus menjadi penggerak utama dalam menggalakkan musyawarah desa yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan kebijakan yang lebih responsif.

Kendala lain yang dihadapi oleh BPD adalah kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran desa yang terbatas sering kali hanya difokuskan pada program pembangunan fisik, sehingga aspek pemberdayaan dan pengawasan yang menjadi peran BPD kurang diperhatikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPD untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan anggaran yang memadai, BPD akan mampu melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian oleh Rinto dkk (2021) menunjukkan bahwa koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa bersifat kemitraan, di mana BPD berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Koordinasi ini didukung oleh hubungan harmonis dan partisipasi masyarakat, namun dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan sarana, pola komunikasi yang belum optimal, serta kurangnya pemahaman terhadap fungsi BPD.

Atmaja dkk (2022) meneliti fungsi pengawasan BPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasilnya menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsi pengawasan ini berdampak positif terhadap kualitas dan kuantitas pelaksanaan proyek pembangunan. Namun, diperlukan penguatan fungsi BPD melalui regulasi setingkat undang-undang agar tercipta mekanisme check and balance yang lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian oleh Razak dkk (2024) menemukan bahwa implementasi fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum sepenuhnya optimal. Fungsi-fungsi penting seperti pembahasan peraturan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan kinerja kepala desa masih belum berjalan maksimal. Hambatan-hambatan yang diidentifikasi meliputi faktor hukum, budaya hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh BPD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sudirman. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran mengenai sejauh mana BPD berperan dalam membangun pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran BPD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan untuk memperkuat peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Populasi penelitian sebanyak 60 orang, dengan sampel 30 responden menggunakan teknik sampling jenuh. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, reliabilitas, korelasi, koefisien determinasi, uji t, ANOVA, dan regresi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel Item	r Hitung	Signifikansi	Keterangan
X.1	0,4819	0,004	Valid
X.2	0,5715	0,000	Valid
X.3	0,4793	0,003	Valid
X.4	0,5278	0,001	Valid
X.5	0,4036	0,012	Valid
Y.1	0,5782	0,001	Valid
Y.2	0,5382	0,002	Valid
Y.3	0,3709	0,045	Valid
Y.4	0,4033	0,027	Valid
Y.5	0,5708	0,001	Valid

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel X (X.1 hingga X.5) dan variabel Y (Y.1 hingga Y.5) menunjukkan nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel dan memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item dalam instrumen penelitian ini dinyatakan valid, artinya setiap butir pertanyaan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai

dengan variabel yang diteliti. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas dan layak digunakan untuk mengumpulkan data dalam mengkaji pengaruh Badan Permusyawaratan Desa terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

1. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Varuabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Peran BPD	0.850	Reliabel
Penyelenggaraan pemerintah desa	0.880	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel *Peran BPD* memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,850 dan variabel *Penyelenggaraan Pemerintah Desa* sebesar 0,880. Kedua nilai tersebut berada di atas standar minimal 0,70, yang berarti seluruh instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Artinya, instrumen yang digunakan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dalam mengukur masing-masing variabel dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam pengumpulan data.

2. Uji Korelasi

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS, maka adapun hasil uji korelasi dalam peneitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi

Variabel	Penyelenggaraan Pemerintah Desa(Y)
Peran BPD (X)	Korelasi (r) = 0.514
Signifikan (p) = 0.004	

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,514 dan nilai signifikansi (p) sebesar 0,004. Nilai koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat dan positif antara variabel Peran BPD (X) dengan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y). Artinya, semakin baik peran yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa, maka semakin meningkat pula kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran BPD memiliki pengaruh yang nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

3. Koefisien Determinasi

Adapun hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.514 ^a	.264	.238	1.09085
a. Predictors: (Constant), XX				

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai R Square sebesar 0,264 atau setara dengan 26,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu menjelaskan sebesar 26,4% variasi yang terjadi pada variabel Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan sisanya sebesar 73,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Meskipun kontribusi peran BPD tidak sepenuhnya dominan, hasil ini tetap menunjukkan adanya pengaruh yang cukup berarti dan relevan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

4. Uji Signifikansi (Uji T)

Adapun hasil uji signifikansi (uji T) dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Signifikasi (Uji T)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	24.106	.949		25.412	.000
Peran BPD	-.179	.056	-.514	-3.170	.004
a. Dependent Variable: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil output regresi linear sederhana pada Tabel 8, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 24,106 - 0,179X$$

Keterangan:

- a. Y = Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. X = Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. 24,106 merupakan konstanta (intersep), yang menunjukkan bahwa jika tidak ada peran BPD ($X = 0$), maka nilai penyelenggaraan pemerintahan desa diperkirakan sebesar 24,106.
- d. -0,179 merupakan koefisien regresi variabel X, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam peran BPD justru diikuti dengan penurunan sebesar 0,179 satuan pada penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil uji signifikansi dapat disimpulkan bahwa variabel Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 yang berada di bawah batas signifikan 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial, peran BPD memang berkontribusi terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meskipun arah hubungan yang ditunjukkan adalah negatif. Selain itu, nilai t hitung sebesar -3,170 yang lebih besar secara absolut dari t tabel ($\pm 2,048$) memperkuat bukti bahwa pengaruh tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran BPD secara signifikan memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sehingga penting untuk memperhatikan bagaimana peran tersebut dijalankan agar selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan partisipatif.

Pembahasan

1. Pengaruh BPD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara peran BPD dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,514 menunjukkan hubungan yang cukup kuat, sementara nilai signifikansi 0,004 (lebih kecil dari 0,05) membuktikan hubungan tersebut signifikan secara statistik. Artinya, semakin optimal peran BPD, semakin baik pula kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sudirman.

Temuan ini sejalan dengan teori partisipatif (Huntington, 1991) yang menyatakan bahwa pelibatan masyarakat melalui lembaga seperti BPD dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan, sesuai dengan prinsip good governance: partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Juga didukung oleh Teori Sistem David Easton, di mana BPD berperan sebagai penyalur aspirasi (input) masyarakat yang memengaruhi kebijakan (output), sehingga peran optimal BPD mendorong pemerintahan desa yang responsif, terbuka, dan demokratis.

2. Kontribusi BPD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah di Desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

BPD berperan strategis dalam mendorong pemerintahan desa yang partisipatif dan transparan melalui perumusan kebijakan, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD berkontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan nilai R Square sebesar 26,4%,

meskipun bukan faktor dominan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan peran BPD guna meningkatkan efektivitas tata kelola dan pelayanan publik di desa.

Temuan ini sejalan dengan teori partisipatif (Huntington, 1991), yang menekankan pentingnya peran lembaga representatif dalam meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, sesuai dengan prinsip good governance, keterlibatan BPD mencerminkan penerapan nilai partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Ditinjau dari Teori Sistem David Easton, BPD berfungsi sebagai saluran input dari masyarakat yang memengaruhi kebijakan (output) pemerintah desa. Oleh karena itu, penguatan peran BPD penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang responsif dan demokratis.

3. Pengaruh BPD terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

BPD sebagai mitra strategis kepala desa berperan dalam pengawasan, penyaluran aspirasi, dan perumusan kebijakan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (signifikansi 0,004; t hitung $-3,170 > t$ tabel). Namun, arah hubungan negatif mengindikasikan bahwa peran BPD yang tidak sinergis justru dapat menurunkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori Kontingensi Fred Fiedler (1967) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi tergantung pada kesesuaian antara peran, struktur, dan situasi. Dalam konteks ini, peran BPD yang tidak dijalankan secara tepat atau tidak selaras dengan kepala desa dapat mengganggu koordinasi dan menurunkan kinerja pemerintahan desa. Selain itu, hal ini juga menunjukkan perlunya penerapan prinsip good governance, terutama sinergi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik antarlembaga desa guna mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh badan permusyawaratan desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara peran BPD dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Koefisien korelasi sebesar 0,514 menunjukkan hubungan yang cukup kuat, dan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ menegaskan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Artinya, semakin optimal peran BPD, semakin baik pula kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Peran BPD memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, meskipun belum menjadi faktor dominan. Nilai R Square sebesar 26,4% mengindikasikan adanya pengaruh nyata, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan pelayanan publik.
3. Peran BPD berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili. Meskipun arah hubungan negatif, hal ini mengindikasikan bahwa peran BPD yang kurang sinergis dapat

menurunkan efektivitas pemerintahan desa. Nilai signifikansi $0,004 < 0,05$ dan t hitung $-3,170 > t$ tabel membuktikan pengaruh tersebut nyata secara parsial.

Ucapan Terima Kasih*

Dalam penyusunan artikel penelitian ini, banyak pihak yang telah memberikan motivasi, saran, dukungan, bahkan masukan yang sangat membantu peneliti. Pada kesempatan yang berharga ini, peneliti bermaksud menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak terutama kepada Prof. Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Makassar. Dr. Nahdiana, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Makassar. Dr. Sahrudin Malik, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Islam Makassar. Dr. H. Djainuddin M,M.Si. selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan ilmu dan solusi atas segala permasalahan dan kesulitan dalam pembuatan dan penulisan tugas akhir ini. Dra.Tetty Dwiyantri,M.Si. selaku dosen penguji yang telah berkenan mengarahkan dan membantu peneliti selama penyusunan tugas akhir ini serta memberikan tambahan ilmu dalam penulisan ini.

Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada orang tua Bapak La Hameri dan Ibu Wa Ube, beserta om dan tante, Bapak Aalam Syaharuddin dan Ibu Mihaya yang telah memberikan dukungan serta doa kepada peneliti. Kakakku yang tercinta dan adiku yang telah memberikan doa kepada peneliti. Sahabat sahabat Program studi administrasi public yang telah memberikan motivasi dan Pelajaran selama penyelesaian studi kepada peneliti. Sahabat sahabat KKN desa Macille yang telah memberikan motivasi, doa kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa tugas akhir yang dibuat masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran, masukan, bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain, khususnya dalam bidang Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

REFERENSI

- Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30
Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59
Agus Wahyudi, Diah Anggeraini Hasri. (2021). Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dan Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Jurnal Maneksi Vol. 10, No. 1, Bulan Juni Tahun 2021.
Creswell, J. W. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th Edition). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Dwiyanto, A. (2011). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Eet Saeful Hidayat dan Deliana Novia Rahmah. (2021). Pengaruh Koordinasi Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Jurnal Moderat Vol. 7 Nomor 1.
Kusnadi. (2016). Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa. Jakarta: Rajawali Pers.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th Edition). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Riyadi, S., & Haryanto, A. (2014). *Teori dan Praktik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sofian Malik. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa. *Jurnal Uis Constituendum*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutoro Eko. (2015). *Desa Membangun Indonesia: Paradigma dan Aksi*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa.
- Soetomo. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish* (2nd Edition). New York: Guilford Press.